

APBD TAHUN 2026

2025

PERDA KAB.TEGAL NO. 7, LD TH 2025 , NO. 7 , TLD NO 188 , 9 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - Bawa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Bawa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Bawa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah .

- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 17 Tahun 2020 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: Pendapatan Daerah , Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah . APBD berjumlah Rp 2.962.510.956.600,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) , dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp 2.825.978.956.600,00 Belanja Daerah Rp 2.960.010.956.600,00 Defisit Rp134.032.000.000,,00 Pembiayaan Daerah 1. penerimaan Rp 136.532.000.000,00 2. pengeluaran Rp.2.500.000.000,00 Pembiayaan netto Rp 134.032.000.000,00 sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 24 Deseber 2025

- APBD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati.
- Penjelasan : 3 hlm
- Lampiran : 1367 hlm

